

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Negeri Manado;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 404);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disebut Unima adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Statuta Unima yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unima yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Unima.
3. Organisasi Unima adalah unit kerja Unima yang secara bersama melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan fungsi manajemen sumber daya.
4. Senat Unima yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan Unima.
5. Rektor adalah pemimpin Unima.
6. Senat Fakultas adalah unsur yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unima dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Unima.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Unima.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unima.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Unima memiliki visi unggul dan inovatif berdasarkan *Mapalus*.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kearifan lokal yang memiliki makna gotong royong.

### Pasal 3

Unima memiliki misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dan berkarakter dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemecahan masalah pembangunan;
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membangun kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi;
- d. menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. membangun jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Unima.

### Pasal 4

Unima bertujuan untuk:

- a. menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, cerdas, profesional, kompetitif, dan sehat jasmani dan rohani;
- b. menghasilkan temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi;
- c. meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mewujudkan tata kelola universitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan adil; dan
- e. mewujudkan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat nasional dan global.

### Pasal 5

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Unima menyusun:
  - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
  - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Prosedur operasional penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 6

- (1) Unima berkedudukan di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara sebagai kampus utama.
- (2) Unima didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 2450/KB/1955 tanggal 22 September 1955 dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru dan selanjutnya berubah menjadi Unima berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2000 tanggal 13 September 2000.
- (3) Tanggal 22 September merupakan hari jadi Unima.

### Pasal 7

- (1) Unima memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
- (2) Ketentuan mengenai lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

### Bagian Kesatu Pendidikan

### Pasal 8

- (1) Unima menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program sarjana;
  - b. program magister; dan
  - c. program doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program spesialis.
- (5) Prosedur operasional penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 9

- (1) Tahun akademik merupakan jangka waktu masa penyelenggaraan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu.
- (3) Tahun akademik dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- (4) Tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unima dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
- (3) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (5) Prosedur operasional mengenai sistem kredit semester dan bentuk pembelajaran ditetapkan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi untuk setiap program sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan seni dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 12

- (1) Penerimaan Mahasiswa di lingkungan Unima dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras,

kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

#### Pasal 13

- (1) Unima dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unima dapat menerima warga negara asing sebagai Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Unima mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa yang:

- a. memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi;
  - b. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
  - c. penyandang disabilitas,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Prosedur operasional penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 16

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Unima.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah di Unima.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Unima.

#### Pasal 17

- (1) Unima melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Tata cara penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.

- (4) Tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

## Bagian Kedua Penelitian

### Pasal 19

- (1) Penelitian di Unima merupakan kegiatan untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian yang diselenggarakan di Unima meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan, serta jenis penelitian lainnya.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
  - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan seni; dan
  - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

### Pasal 20

- (1) Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan penelitian diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

### Pasal 21

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian.
- (3) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

#### Pasal 23

- (1) Pengabdian kepada masyarakat di Unima merupakan kegiatan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi bagi kemajuan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

#### Pasal 24

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat dan dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan.

#### Pasal 25

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengembangan materi pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat di dalam negeri atau luar negeri.

#### Pasal 26

Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Bagian Keempat Kode Etik

#### Pasal 27

- (1) Unima menjunjung tinggi norma etik.
- (2) Dalam melaksanakan norma etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kode etik Dosen;
  - b. kode etik Mahasiswa; dan
  - c. kode etik Tenaga Kependidikan.

- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Unima dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

#### Pasal 28

- (1) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Kode etik Tenaga Kependidikan Unima diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Bagian Kelima

#### Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

#### Pasal 29

- (1) Unima menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di Unima.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unima;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
  - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan di Unima.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Unima untuk:
  - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 32

Prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam  
Gelar dan Penghargaan

Pasal 33

- (1) Unima memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan Unima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unima mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara Pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 34

- (1) Unima dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan Unima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unima dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara Pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 35

- (1) Unima dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
- (2) Tata cara Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni

#### Pasal 36

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Unima.
- (2) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (3) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Unima dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;

- c. memanfaatkan fasilitas Unima dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai ketentuan yang berlaku di Unima;
  - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi dalam penyelesaian studinya;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
  - f. memanfaatkan sumber daya Unima melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan layanan penalaran, kesejahteraan, dan minat dan bakat;
  - g. pindah perguruan tinggi lain atau program studi lainnya jika memenuhi persyaratan dan daya tampung penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
  - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa Unima;
  - i. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Unima; dan
  - j. mengikuti kegiatan kompetisi, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Unima dan/atau atas nama Unima.
- (4) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Unima;
  - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Unima;
  - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
  - e. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional; dan
  - f. menjaga kewibawaan dan nama baik Unima.
- (5) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 37

- (1) Unima melaksanakan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial.
- (2) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

- (3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (4) Kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 38

- (1) Alumni Unima merupakan seseorang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program studi di Unima.
- (2) Alumni Unima ikut bertanggung jawab menjaga nama baik Unima dan aktif berperan serta dalam memajukan Unima.
- (3) Hubungan antara Unima dan alumni Unima diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni Unima terhimpun dalam Ikatan Alumni Unima yang selanjutnya disebut IKA Unima.
- (5) Pengelolaan organisasi IKA Unima diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Unima.

### BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu Organisasi Unima

#### Paragraf 1 Susunan Organisasi

#### Pasal 39

Organisasi Unima terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Pemimpin Unima;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

#### Paragraf 2 Senat

#### Pasal 40

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
  - a. menetapkan norma dan kebijakan akademik;
  - b. melakukan pengawasan terhadap penerapan norma dan kebijakan akademik;
  - c. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Unima;
  - d. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - e. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
  - f. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;

- g. mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - h. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
  - i. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
  - j. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - k. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan akademik profesor; dan
  - l. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, kode etik, dan kebijakan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 41

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang wakil profesor dari setiap Fakultas;
  - b. 2 (dua) orang wakil Dosen bukan profesor yang bergelar doktor dari setiap Fakultas;
  - c. Rektor;
  - d. wakil Rektor;
  - e. dekan;
  - f. direktur pascasarjana; dan
  - g. kepala lembaga.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari:
- a. wakil profesor dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
    - 1. dipilih oleh Senat Fakultas jika jumlah profesor lebih 3 (tiga) orang pada Fakultas; atau
    - 2. ditetapkan sebagai anggota Senat jika jumlah profesor paling banyak 3 (tiga) orang pada Fakultas; dan
  - b. wakil Dosen bukan profesor dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Senat Fakultas.
- (3) Dalam hal jumlah Dosen profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, anggota dari unsur Dosen profesor diganti dengan unsur Dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala yang bergelar doktor.
- (4) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 42

- (1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat

- yang bukan Rektor, bukan wakil Rektor, bukan dekan, bukan direktur pascasarjana, dan bukan kepala lembaga.
- (3) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang memiliki jabatan akademik profesor.

Pasal 43

- (1) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil profesor dan wakil Dosen bukan profesor dari setiap Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari Rektor, wakil Rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan kepala lembaga bersifat *ex officio*.

Pasal 44

- (1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan komisi atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 46

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, Unima memiliki Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
- (3) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Pemimpin Unima

Pasal 47

- (1) Pemimpin Unima merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unima untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin Unima memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
  - b. menyusun norma dan kebijakan akademik untuk disampaikan kepada Senat;
  - c. menetapkan kode etik yang berlaku di Unima;
  - d. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan jangka panjang;
  - e. menyusun dan menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun;

- f. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional;
- g. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- h. mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menjatuhkan sanksi administratif kepada Sivitas Akademika yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan Senat;
- j. menjatuhkan sanksi administratif kepada Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- k. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- l. menerima, mengembangkan, membina dan memberhentikan Mahasiswa;
- m. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- p. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
- q. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- r. menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi Unima; dan
- s. mengelola Unima sesuai kewenangan yang diberikan oleh Menteri dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Rektor merupakan pemimpin Unima yang menyelenggarakan dan mengelola Unima.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil Rektor.

Pasal 49

- (1) Unsur organisasi di bawah Pemimpin Unima terdiri atas:
  - a. pelaksana akademik;
  - b. pelaksana administrasi;
  - c. penjaminan mutu; dan
  - d. penunjang akademik atau sumber belajar.
- (2) Rektor dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 50

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Unima diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 51

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik;
  - b. menetapkan prosedur operasional pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
  - c. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
  - e. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 52

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah gasal dengan komposisi keahlian:
  - a. bidang akuntansi atau keuangan;
  - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
  - c. bidang manajemen aset;
  - d. bidang hukum; dan
  - e. bidang ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
  - a. berstatus aparatur sipil negara;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah sarjana bagi Tenaga Kependidikan;
- e. belum memasuki usia:
  - 1. 65 (enam puluh lima) tahun untuk Dosen profesor;
  - 2. 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen nonprofesor; dan
  - 3. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
- f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi untuk mengembangkan Unima;
- g. tidak sedang merangkap jabatan struktural atau tugas tambahan di lingkungan Unima; dan
- h. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

#### Pasal 53

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Pemilihan keanggotaan Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Paragraf 5

#### Dewan Penyantun

#### Pasal 54

- (1) Dewan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Unima.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
  - a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
  - b. perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
  - c. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Unima; dan
  - d. penggalangan dana untuk membantu pembangunan Unima.

Pasal 55

Anggota Dewan Penyantun berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:

- a. Gubernur Sulawesi Utara;
- b. 5 (lima) orang dari unsur pemerintah kabupaten/kota;
- c. 2 (dua) orang dari unsur pengusaha;
- d. 2 (dua) orang dari unsur alumni; dan
- e. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Paragraf 1

Pengangkatan Rektor dan Pemimpin Organisasi di bawah Rektor

Pasal 56

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala unit penunjang akademik, dan kepala laboratorium/bengkel/studio.
- (2) Tenaga Kependidikan di lingkungan Unima dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas, dan kepala unit penunjang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengangkatan Tenaga Kependidikan menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika terdapat lowongan jabatan.

Pasal 57

- (1) Lowongan jabatan terjadi karena:
  - a. terdapat pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan; dan/atau
  - b. perubahan Organisasi Unima.
- (2) Pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. mengundurkan diri dari jabatan atau permohonan sendiri;
  - d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
  - e. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara lainnya;
  - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - h. diberhentikan dari jabatan;
  - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
  - j. ditugaskan secara penuh di luar tugas jabatan Dosen;

- k. menjalani tugas belajar/izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - l. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
  - m. berdasarkan evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji Kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
  - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
  - b. perubahan bentuk Unima.

#### Pasal 58

- (1) Dosen yang diangkat dengan tugas tambahan sebagai Rektor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen yang diangkat dengan tugas tambahan sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, atau kepala unit penunjang akademik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus pegawai negeri sipil;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
  - e. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
  - f. belum memasuki usia 61 (enam puluh satu) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - h. memiliki setiap unsur penilaian kerja pegawai negeri sipil paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

- l. memiliki kualifikasi akademik doktor untuk jabatan wakil Rektor, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dekan, dan kepala lembaga;
- m. menduduki jabatan akademik paling rendah:
  1. lektor kepala bagi calon wakil Rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan kepala lembaga; dan
  2. lektor bagi calon wakil dekan, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala unit penunjang akademik.
- n. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
- o. tidak sedang merangkap jabatan di:
  1. perguruan tinggi lain;
  2. lembaga pemerintah;
  3. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; atau
  4. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Unima.

#### Pasal 59

Untuk diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus aparatur sipil negara;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. belum memasuki usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat diangkat;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- k. memiliki jabatan fungsional paling rendah ahli muda; dan
- l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi.

#### Pasal 60

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas merupakan pimpinan unit pelaksana administrasi.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan

pejabat pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
  - a. tahap penjaringan;
  - b. tahap pemberian pertimbangan; dan
  - c. tahap pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

Pasal 66

Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. Rektor membentuk panitia penjaringan bakal calon dekan;
- b. panitia penjaringan bakal calon dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
- c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia penjaringan bakal calon dekan;
- d. panitia penjaringan bakal calon dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon dekan kepada Rektor;
- e. jika bakal calon dekan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia penjaringan bakal calon dekan melakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 5 (lima) hari kerja; dan
- f. Panitia penjaringan menyampaikan hasil penjaringan bakal calon dekan kepada Rektor dan Senat Fakultas.

Pasal 67

Tahap pemberian pertimbangan calon dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rapat Senat Fakultas sebagai berikut:

- a. rapat Senat Fakultas dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- b. dalam hal syarat kehadiran Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
- c. apabila telah dilakukan perpanjangan rapat Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b belum memenuhi syarat kehadiran, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- d. calon dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja pengembangan fakultas;
- e. anggota Senat Fakultas yang hadir memberikan pertimbangan terhadap calon dekan berdasarkan visi, misi, dan program kerja;
- f. jika anggota Senat Fakultas mencalonkan diri sebagai calon dekan, tidak berhak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
- g. Senat fakultas menyampaikan calon dekan berdasarkan hasil pertimbangan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) hari setelah rapat Senat Fakultas.

Pasal 68

Rektor memilih dan menetapkan pengangkatan dekan berdasarkan hasil pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g.

Pasal 69

- (1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Direktur dan wakil direktur pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan direktur dan wakil direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Kepala lembaga dan sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor;
- (2) Masa jabatan kepala dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Ketua jurusan dan sekretaris jurusan diangkat oleh Rektor.

- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 73

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

#### Pasal 74

- (1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 75

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
  - a. kepala biro/jabatan tinggi pratama;
  - b. kepala bagian/administrator pada biro; dan
  - c. kepala subbagian/pengawas pada biro, fakultas, program pascasarjana, lembaga, dan unit penunjang akademik.
- (2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pengangkatan Pimpinan Senat

#### Pasal 76

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Calon ketua Senat diajukan oleh Rektor sebanyak 3 (tiga) calon yang berasal dari anggota Senat bukan Rektor, bukan wakil Rektor, bukan dekan, bukan direktur pascasarjana, dan bukan ketua Lembaga.
- (3) Ketua Senat dipilih oleh anggota Senat.

#### Pasal 77

- (1) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam hal sidang Senat belum dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, sidang ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Apabila telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

- (6) Pemilihan ketua Senat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara.
- (8) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (9) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih dari hasil musyawarah untuk mufakat atau calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (11) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.

### Paragraf 3

#### Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 78

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### Paragraf 4

#### Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

#### Pasal 79

- (1) Dewan Penyantun diketuai oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Sekretaris Dewan Penyantun diangkat dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan ketua Dewan Penyantun.
- (4) Masa jabatan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

### Paragraf 5

#### Pemberhentian Rektor dan Pimpinan Organisasi di bawah Rektor

#### Pasal 80

- (1) Rektor diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit penunjang akademik, ketua jurusan, dan sekretaris jurusan diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. permohonan sendiri;

- d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
  - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - h. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - i. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
  - j. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - k. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
  - l. Berdasarkan evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
  - c. berhenti sebagai aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

#### Pasal 81

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Rektor sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sama dengan 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 83

Ketentuan mengenai pengangkatan dan penetapan wakil Rektor definitif karena pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengangkatan dan penetapan wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala unit penunjang akademik, karena pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir.

#### Pasal 84

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan wakil dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan pengangkatan dekan.

- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 6

Pemberhentian Pimpinan Senat, Pimpinan Satuan Pengawas Internal, dan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 85

- (1) Ketua, sekretaris, anggota Senat, Satuan Pengawas Internal, dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
  - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - h. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
  - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
  - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
  - c. berhenti sebagai aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua Senat baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir, ketua Senat menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan anggota Senat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris dan anggota Dewan Penyantun sebelumnya.
- (2) Ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Ketiga

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 91

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unima merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Unima:
  - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
  - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
  - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unima dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
  - a. taat asas;
  - b. akuntabilitas;
  - c. transparansi;
  - d. objektivitas;

- e. jujur; dan
- f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan Internal Unima terdiri atas:
  - a. bidang keuangan;
  - b. bidang aset; dan
  - c. bidang kepegawaian.
- (5) Prosedur operasional mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Unima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat  
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 92

- (1) Dosen terdiri atas:
  - a. Dosen tetap; dan
  - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Unima
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Unima.
- (4) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier, serta pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
  - a. asisten ahli;
  - b. lektor;
  - c. lektor kepala; dan
  - d. profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 94

- (1) Profesor yang telah purna tugas dapat diusulkan perpanjangan masa tugasnya.
- (2) Perpanjangan masa tugas profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Unima menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kependidikan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.

- (3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 96

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Unima didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur operasional mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Anggaran

Pasal 97

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Unima diajukan oleh Rektor kepada Menteri.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Unima direviu oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB V  
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 98

Sistem penjaminan mutu Unima terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 99

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal Unima bertujuan untuk:
  - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
  - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
  - c. mengupayakan semua unit di Unima untuk bekerja sesuai dengan standar.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
- (4) Prosedur operasional sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 100

Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK PERATURAN DI UNIMA

Pasal 101

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan Unima terdiri atas:
  - a. Peraturan Senat; dan
  - b. Peraturan Rektor.
- (2) Prosedur operasional mengenai tata cara pembentukan Peraturan Senat dan Peraturan Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu  
Pendanaan

Pasal 102

- (1) Pendanaan Unima dapat berasal dari:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. masyarakat; dan
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang diperoleh dari masyarakat terdiri atas:
  - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;

- b. biaya seleksi ujian masuk;
  - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Unima;
  - d. hasil produk inovasi dari penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. sumbangan dan/atau hibah pemerintah daerah, perorangan dan/atau lembaga yang sah; dan
  - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan Unima yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan negara yang dikelola Unima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

Pengelolaan pendanaan Unima dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kekayaan

#### Pasal 104

- (1) Kekayaan Unima meliputi aset berwujud, yaitu aset tetap dan aset tak berwujud yang merupakan milik negara yang dikelola oleh Unima
- (2) Kekayaan Unima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Unima.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Unima merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Unima dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KERJA SAMA

#### Pasal 105

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, Unima dapat menjalin kerja sama akademik dan nonakademik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan perguruan tinggi atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,

- produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
  - b. menghargai kesetaraan mutu;
  - c. saling menghormati;
  - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
  - e. keberlanjutan; dan
  - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

#### Pasal 106

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama perguruan tinggi.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Organ Unima yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukan penyesuaian Organ Unima berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
  - b. Pimpinan organ Unima yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pimpinan organ sesuai dengan peraturan Menteri ini;
  - c. semua kegiatan akademik dan nonakademik yang sedang diselenggarakan tetap diselenggarakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian Organ dan pimpinan organ Unima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (3) Masa jabatan pimpinan organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 108

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 805

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK,  
DAN BUSANA ALMAMATER

I. LAMBANG



Unima memiliki lambang berbentuk lingkaran berwarna biru yang di dalamnya terdapat sebuah pena berwarna putih dengan 9 (sembilan) helai daun kelapa berwarna kuning kehijauan di sebelah kanan dan kiri, seekor Elang Sulawesi berwarna merah dengan bulu sayap berjumlah 13 (tiga belas) helai mencengkeram tabung ijazah, di atas mata pena yang bertumpu di 2 (dua) lapisan buah kelapa kehijauan dengan buku berwarna putih di sebelah kanan dan kirinya, dan angka 1955 berwarna putih di sebelah bawah buku serta tulisan UNIVERSITAS NEGERI MANADO berwarna merah di sebelah atas lingkaran dan tulisan UNIMA TONDANO berwarna hitam dengan jenis huruf Arial di sebelah bawah lingkaran yang dipisahkan dengan 2 (dua) tanda bintang berwarna hitam, di atas dasar warna putih.

Rincian Lambang Unima sebagai berikut:

- a. elang Sulawesi bermakna simbol kearifan dan kebijaksanaan karena memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungannya dan memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengidentifikasi objek dari tempat tertinggi sampai ke tempat terendah, seperti peran Unima dalam pembangunan bukan sebagai “menara gading” melainkan menjadi mitra dan milik masyarakat;
- b. 13 (tiga belas) helai bulu sayap burung Elang Sulawesi dan 9 (sembilan) helai daun kelapa bermakna Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Manado menjadi Universitas Negeri Manado yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2000 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Manado menjadi Universitas Negeri Manado, tanggal 13 September 2000;
- c. tabung ijazah dalam gengaman elang bermakna Unima sebagai perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara;

- d. pena bermakna tanggung jawab Unima sebagai institusi yang memiliki peran mengkomunikasikan pengetahuan yang mencerdaskan;
- e. daun kelapa dan 2 (dua) lapisan buah kelapa bermakna tekad dan pengabdian Unima selalu tumbuh subur dalam membangun daerah dan bangsa Indonesia;
- f. buku bermakna tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. angka 1955 merupakan tahun berdirinya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Tondano, yang saat ini kemudian dikenal dengan nama Unima;
- h. warna yang digunakan sebanyak 5 (lima) jenis, yaitu: (1) Biru bermakna tanggung jawab Unima dalam memasuki persaingan global, (2) Merah bermakna keberanian Unima dalam menghadapi tantangan untuk selalu dapat mengembangkan diri, (3) Kuning bermakna optimistis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) Hitam bermakna Unima sebagai institusi formal akademis, dan (5) Putih bermakna kejujuran dalam mengemban tugas suci mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara;
- i. tanpa garis pembatas di bagian luar bermakna Unima yang terbuka dan bebas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lambang Unima memiliki kode warna sebagai berikut:

- a. lambang lingkaran berwarna biru dengan kode warna RGB 0, 55, 23;
- b. lambang pena, lembar buku, angka 1955, dan tabung ijazah berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255;
- c. lambang helai daun kelapa, dan lapisan buah kelapa berwarna kuning dengan kode warna RGB 254, 242, 0;
- d. lambang seekor elang Sulawesi tulisan UNIVERSITAS NEGERI MANADO berwarna merah dengan kode warna RGB 236, 28, 35; dan
- e. lambang tulisan UNIMA TONDANO, tanda bintang, kontur (lingkaran dalam, tabung ijazah, buku, pena, daun dan buah kelapa) berwarna hitam dengan kode warna RGB 0, 0, 10.

## II. BENDERA

Bendera terdiri atas Bendera Universitas Negeri Manado dan Bendera Fekultas/Pascasarjana.

### A. Bendera Universitas Negeri Manado



Unima memiliki bendera berbentuk segi empat Panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna biru dengan kode RGB 0, 0, 230, dan di tengahnya terdapat lambang Unima.

B. Bendera Fakultas/Pascasarjana

1. Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian



Bendera Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian berwarna biru tua dengan kode RGB 6, 34, 80.

2. Fakultas Teknik



Bendera Fakultas Teknik berwarna oranye dengan kode RGB 255, 97, 1.

3. Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat



Bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat berwarna putih gading dengan kode RGB 255, 255, 250.

4. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi



Bendera Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi berwarna hijau dengan kode RGB 0, 128, 0.

5. Fakultas Bahasa dan Seni



Bendera Fakultas Bahasa dan Seni berwarna ungu dengan kode RGB 153-0-153.

6. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum



Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum berwarna merah dengan kode RGB 255-0-0.

7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna kuning emas dengan kode RGB 255, 216, 0.

8. Program Pasca Sarjana



Bendera Program Pascasarjana berwarna coklat dengan kode RGB 150, 75, 0 dan garis putih dengan kode RGB 255, 255, 255 membujur di tengah berukuran 0,20 dari lebar.

III. HIMNE

Score

# HYMNE UNIMA

SYAIR : PHILOTEUS TUERAH  
MELODI : ORBANUS NAHARIA  
ARR : JARIS P. A. BANUA

Andante ♩ = 68

Soprano

Wa hai se ge nap Ci vi tas A ca de mi ca U ni

Alto

Wa hai se ge nap Ci vi tas A ca de mi ca U ni

Tenor

Wa hai se ge nap Ci vi tas A ca de mi ca U ni

Bass

Wa hai se ge nap Ci vi tas A ca de mi ca U ni

S

ver si tas Ne ge ri Ma na do Ber sa ma sa ma ki ta me lak sa na kan Tri...

A

ver si tas Ne ge ri Ma na do Ber sa ma sa ma ki ta me lak sa na kan Tri

T

ver si tas Ne ge ri Ma na do Ber sa ma sa ma ki ta me lak sa na kan Tri

B

ver si tas Ne ge ri Ma na do Ber sa ma sa ma ki ta me lak sa na kan Tri

2

HYMNE UNIMA

8

S DHAR MA Per gu ru an ting gi Pen di di kan dan pe ne li ti an, Ser ta

A DHAR MA Per gu ru an — ting gi Pen di di kan dan pe ne li ti an, ser ta

T DHAR MA Per gu ru an ting gi Pen di di kan dan pe ne li ti an, ser ta

B DHAR Ma Per gu ru an ting gi Pen di di kan dan pe ne li ti an, ser ta

12

S pe ngab di an pa da ma — sya ra kat Sa tu kan te kat un tuk me — ma ju kan U ni

A pe ngab di an pa da ma — sya ra kat Sa tu kan te kat un tuk me — ma ju kan U ni

T pe ngab di an pa da ma<sup>3</sup> sya ra kat Sa tu kan te kat un tuk me<sup>3</sup> ma ju kan U ni

B pe ngab di an pa da ma — sya ra kat Sa tu kan te kat un tuk me<sup>3</sup> ma ju kan U ni

HYMNE UNIMA

16

S  
ver si tas ter cin ta Hi dup ber sa ma mem ba ngun

A  
ver si tas ter cin ta Hi dup ber sa ma mem ba ngun

T  
8  
ver si tas ter cin ta Hi dup ber sa ma

B  
ver si tas ter cin ta Hi dup ber sa ma

19

S  
ber sa ma se jah tra ber sa ma me nu ju

A  
ber sa ma se jah tra ber sa ma me nu ju

T  
8  
mem ba ngun ber sa ma se jah tra ber sa ma

B  
mem ba ngun ber sa ma se jah tra ber sa ma

4

HYMNE UNIMA

22

S  
U NI MA yang ber kua li tas ung gul dan di per hi tung kan Ki ta

A  
U NI MA yang ber kua li tas ung gul dan di per hi tung kan Ki ta

T  
me nu ju U NI MA yang ber kua li tas ung gul dan di per hi tung kan Ki ta

B  
me nu ju U NI Ma yang ber kua li tas ung gul da di per hi tung kan Ki ta

26

S  
do rong ge ne ra si mu da men ja di pe ne rus pe ru ba han Da lam mem

A  
do rong ge ne ra si mu da men ja di pe ne rus pe ru ba han da lam mem

T  
do rong ge ne ra si mu da men ja di pe ne rus pe ru ba han da lam mem

B  
do rong ge ne ra si mu da men ja di pe ne rus pe ru ba han da lam mem

HYMNE UNIMA

30

S  
ba ngun bang sa dan Ne ga ra me nu ju ma sya ra kat a dil dan me

A  
ba ngun bang sa dan ne ga ra me nu ju ma sya ra kat a dil dan me

T  
ba ngun bang sa dan ne ga ra me nu ju ma sya ra kat a dil dan me

B  
ba ngun bang sa dan ne ga ra me nu ju ma sya ra kat a dil dan me

33

S  
ra ta Ki ra nya Tu han be ser ta ki ta

A  
ra ta Ki ra nya Tu han Tu han be ser ta ki ta

T  
ra ta Ki ra nya Tu han Tu han be ser ta ki ta

B  
ra ta Ki ra nya Tu han be ser ta ki ta

IV. MARS

Score

# MARS UNIMA

FRANKLYN DUMAIS

**DIMARCIA** ♩ = 120

Soprano  
U ni ver si tas Ne gri Ma na do — Bi na Bang sa In do ne sia —

Alto  
U ni ver si tas Ne gri Ma na do — Bi na Bang sa In do ne sia —

Tenor  
U ni ver si tas Ne gri Ma na do — Bi na Bang sa In do ne sia —

Bass  
U ni ver si tas Ne gri Ma na do — Bi na Bang sa In do ne sia —

9  
S  
— Te ram pil pe nuh hik mat Un tuk ke se jah tra an ber sa

A  
— Te ram pil pe nuh hik mat Un tuk ke se jah tra an ber sa

T  
— Kre a tif dan ber i man Un tuk ke se jah tra an ber sa

B  
— Kre a tif dan ber i man Un tuk ke se jah tra an ber sa

17  
S  
ma — U ni ver si tas Ne gri Ma na do — mem ba ngun ber da sar Pan ca si

A  
ma — U ni ver si tas Ne gri Ma na do — mem ba ngun ber da sar Pan ca si

T  
ma — U ni ver si tas Ne gri Ma na do — mem ba ngun ber da sar Pan ca si

B  
ma — U ni ver si tas Ne gri Ma na do — mem ba ngun ber da sar Pan ca si

MARS UNIMA

S  
25  
la Ma ri suk ses kan ci ta ci ta Bang sa U ni ver si tas Ne gri Ma

A  
la Ma ri suk ses kan ci ta ci ta Bang sa U ni ver si tas Ne gri Ma

T  
8  
la Ma ri suk ses kan ci ta ci ta Bang sa U ni ver si tas Ne gri Ma

B  
la Ma ri suk ses kan ci ta ci ta Bang sa U ni ver si tas Ne gri Ma

S  
33  
na do Ja ya lah lah

A  
na do Ja ya lah lah

T  
8  
na do Ja ya lah lah

B  
na do Ja ya lah lah

V. BUSANA AKADEMIK

Unima memiliki busana akademik. Busana akademik terdiri atas busana profesor, busana Senat, dan busana wisudawan. Busana akademik memiliki kelengkapan berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.

VI. BUSANA ALMAMATER

Unima memiliki busana almamater. Busana almamater berupa jas berwarna biru dengan kode RGB 0, 55, 230 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Unima.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001